



newsletter

Tanhana Dharmma Mangrva • edisi 128, Maret 2020



Anggota LPJK Ikuti Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan	2
Mobil Mamografi Hadir di Lemhannas RI ..	3
Lemhannas RI Gelar Dialog Wawasan Kebangsaan di Yogyakarta	4
Diskusi Panel PPRA 60 Hadirkan Menteri Agama	4
Kunjungan <i>Australia Defence College</i> ke Lemhannas RI	5
Bela Negara Adalah Roh Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta	6
Pancasila di Tengah Era Globalisasi	7
Sosialisasi Pembinaan Kesadaran Hukum dan Peraturan Perundang-undangan	8
Agus Wdjojo: "Pahami dan Implementasikan Nilai-Nilai Kebangsaan"	9
KPK Sosialisasikan Budaya Anti Korupsi di Lemhannas RI	10
Upaya Lemhannas RI Mencegah Penyebaran COVID-19	11
Minimalisir Penyebaran COVID-19, Kantor Lemhannas RI Disemprot Disinfektan	11

Kunjungan *Australia Defence College* ke Lemhannas RI

Anggota LPJK Ikuti Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan



Kegiatan pemantapan nilai-nilai kebangsaan yang berlangsung selama sepekan ini bertujuan untuk membekali para peserta dengan materi yang terkait dengan nilai-nilai kebangsaan yang bersumber dari empat konsensus dasar bangsa yang dijadikan sebagai landasan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo
Gubernur Lemhannas RI

hubungan yang baik dan serasi dengan *stakeholder*, masyarakat, dan instansi-instansi pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

Dengan memiliki bekal wawasan kebangsaan dan nilai-nilai kebangsaan, diharapkan LPJK mampu mengedepankan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.

"Dengan demikian, kiranya sangat tepat LPJK mendapatkan pelatihan pemantapan nilai-nilai kebangsaan ini, sebagai wujud kepedulian dan tanggung jawab terhadap nasib bangsa," pungkas Agus.

Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo membuka Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan bagi Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) pada Senin (24/2) di Ruang Pancasila, Gedung Trigatra, Lemhannas RI.

Dalam sambutannya, Agus mengatakan bahwa kegiatan pemantapan nilai-nilai kebangsaan yang berlangsung selama sepekan ini bertujuan untuk membekali para peserta dengan materi yang terkait dengan nilai-nilai kebangsaan yang bersumber dari empat konsensus dasar bangsa yang dijadikan sebagai landasan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Selain materi nilai-nilai kebangsaan yang bersumber dari 4 konsensus dasar bangsa, peserta yang

berjumlah 80 peserta dari berbagai daerah juga diberikan pemahaman mengenai wawasan nusantara, ketahanan nasional, kepemimpinan nasional, dan kewaspadaan nasional. Metode pembelajaran yang digunakan adalah ceramah dan tanya jawab, diskusi kelompok dan antarkelompok, pembinaan peserta, dan *outbound*.

LPJK sendiri memiliki tugas pokok dalam mendorong penelitian, pengembangan, pendidikan dan pelatihan jasa konstruksi, melakukan registrasi badan usaha jasa konstruksi, tenaga kerja yang meliputi klasifikasi, kualifikasi, dan sertifikasi, keterampilan serta keahlian, mendorong dan meningkatkan peran arbitrase, mediasi, dan penilai ahli di bidang jasa konstruksi.

Selain itu, LPJK juga memiliki peran dan fungsi penting dalam upaya menjalin serta membina

Mobil Mamografi Hadir di Lemhannas RI

Perista Lemhannas RI bekerja sama dengan Yayasan Kanker Payudara Indonesia (YKPI) dan RS. Kanker Dharmais mengadakan pemeriksaan mammografi anggota Perista dan karyawan Lemhannas RI pada Kamis (27/2) di Lemhannas RI.

"Tujuan diadakan Mamografi ini adalah untuk memberikan bantuan pemeriksaan kesehatan, khususnya payudara, kepada karyawan Lemhannas RI dan Perista Lemhannas RI," kata PLT Ketua Perista Lemhannas RI Lisa Wieko Syofyan. Kegiatan ini merupakan salah satu program kerja sosial budaya Lemhannas RI dalam rangka HUT Lemhannas RI ke-55.

Lisa juga menjelaskan bahwa program tersebut direncanakan menjadi program rutin tahunan demi meningkatkan kesadaran anggota Perista dan karyawan Lemhannas RI terhadap kesehatan pribadi.

"Harapan saya terutama adalah memberikan kesadaran agar kita semua, khususnya ibu-ibu, yang berada di Lemhannas RI untuk *aware* terhadap kesehatan pribadi khususnya payudara," tutur Lisa.

Dalam kesempatan tersebut, hadir Dokter Poliklinik Deteksi Dini RS. Kanker Dharmais, dr. Rinilda Caesar yang memberikan pengecekan fisik terhadap Pengurus Perista dan karyawan Lemhannas RI. dr. Rinilda juga memberikan penjelasan mengenai Periksa Payudara Sendiri (Sadari), "Sadari bisa dilakukan oleh setiap wanita, dilakukan pada saat sedang tidak haid dan saat mandi," ujar dr. Rinilda.



dr. Rinilda menjelaskan bahwa pada prinsipnya, konsep 3D dapat dilakukan untuk memudahkan wanita dalam melakukan pemeriksaan Sadari. D yang pertama adalah Dilihat apakah bentuk payudaranya simetris atau tidak dan ada luka atau tidak. D yang kedua adalah Diraba, yang bertujuan untuk melihat adanya benjolan atau tidak pada payudara. Kemudian, D yang ketiga adalah Ditekan, yang bertujuan untuk melihat adanya carian yang keluar ketika puting payudara ditekan. Lebih lanjut, dr. Rinilda menjelaskan bahwa jika terdapat keluhan, bisa dilanjutkan dengan pemeriksaan oleh tim medis dan alat seperti Mamografi, USG, dan MRI.

Radiografer Mobil Mamografi, Demayanti, menganjurkan bahwa sebaiknya Mamografi dilakukan oleh wanita yang berusia 40 tahun keatas serta dilakukan satu tahun sekali. "Mamografi adalah pemeriksaan

payudara untuk wanita, berusia diatas 40 tahun. Apabila wanita yang berusia dibawah 40 tahun, pemeriksaan dapat dilakukan melalui MRI payudara," ucap Demayanti.

"Harapan untuk wanita Indonesia, kami dengan ikhlas dan dengan sungguh hati ingin memeriksa wanita-wanita Indonesia untuk pemeriksaan Mamografi. Marilah periksa sedini mungkin untuk kesehatan diri, untuk kesehatan wanita Indonesia," kata Demayanti.

Saat ini Mobil Mamografi telah melakukan pelayanan di beberapa daerah Jabodetabek dan Puskesmas DKI Jakarta. Sekretariat YKPI Jakarta bersedia untuk menghadirkan Mobil Mamografi apabila permintaan dari masyarakat.

Lemhannas RI Gelar Dialog Wawasan Kebangsaan di Yogyakarta



Lemhannas RI menyelenggarakan kegiatan Dialog Wawasan Kebangsaan di Yogyakarta dengan mengusung tema "Dengan Dialog Wawasan Kebangsaan Kita Tingkatkan Implementasi Nilai-Nilai Kebangsaan Yang Bersumber Dari 4 Konsensus Dasar Bangsa guna Meningkatkan Kualitas Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara dalam Rangka Memperkokoh Keutuhan NKRI" selama tiga hari di Hotel Tentrem, Yogyakarta.

Dialog Wawasan Kebangsaan yang dibuka pada Selasa (3/3) ini diikuti 100 orang peserta yang terdiri dari para Tokoh Pemuda, Tokoh Masyarakat (Birokrat, Akademisi, TNI/Polri dan Alumni Taplai), dan Organisasi Kemasyarakatan dari wilayah D.I. Yogyakarta.

Tujuan diadakannya dialog kebangsaan tersebut adalah untuk menggugah kembali semangat kebangsaan, memberikan pencerahan

dan pemahaman tentang nilai-nilai kebangsaan yang bersumber dari 4 Konsensus Dasar Bangsa sehingga terdapat kesamaan persepsi bagi para peserta dalam rangka memantapkan nilai-nilai kebangsaan ke seluruh lingkungan masyarakat.

Melalui kegiatan dialog wawasan kebangsaan tersebut diharapkan terciptanya cara berpikir, bersikap dan bertindak yang sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan, sehingga peserta mampu menjadi agen-agen penggerak perubahan bagi lingkungannya. Selain itu juga diharapkan dapat menumbuhkan semangat kebangsaan yang tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan zaman dan berbagai rongrongan ideologi yang bertentangan dengan nilai-nilai kebangsaan.

Diskusi Panel PPRA 60 Hadirkan Menteri Agama

Peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) 60 mengikuti Diskusi Panel Pancasila PPRA 60 dengan tema "Implementasi Nilai-nilai Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara Indonesia Menghadapi Fundamentalisme Agama" pada Jumat (6/3) di Ruang NKRI, Gedung Panca Gatra Lantai 3, Lemhannas RI.

Hadir sebagai narasumber adalah Menteri Agama, Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan Kemsetneg RI, Prof. Dr. Dadan Wildan, M.Hum. dan Prof. Dr. Azyumardi Azra.

Diskusi panel ini merupakan salah satu metode pembelajaran yang digunakan dalam program pendidikan di Lemhannas RI. Diharapkan dengan

dilaksanakannya diskusi panel ini, para peserta PPRA 60 dapat memperoleh pembekalan dan perluasan wawasan dalam memahami bagaimana implementasi nilai-nilai Pancasila di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dihadapkan dengan fundamentalisme agama.

Nilai-nilai kebangsaan yang terkandung dalam Pancasila tidak cukup untuk sekedar dimengerti dan dipahami tetapi nilai-nilai



tersebut harus diterapkan atau diimplementasikan dan diamalkan dalam segenap kehidupan masyarakat sehingga mampu mengantar bangsa Indonesia mencapai cita-citanya yaitu masyarakat yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur.

Kunjungan Australia Defense College ke Lemhannas RI



Wakil Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI Marsdya TNI Wieko Syofyan, mewakili Gubernur Lemhannas RI, menerima kunjungan Komandan Australia Defense College (ADC) Mayjen Mick Ryan pada Selasa (3/3), di Ruang Tamu Gubernur Lemhannas RI.

Dalam kunjungan tersebut, Wieko dan Ryan berdiskusi mengenai Pusat Bahasa Indonesia yang bertempat di Melbourne. Pusat Bahasa Indonesia tersebut merupakan fasilitas bagi orang Indonesia yang sedang melanjutkan pendidikan di Australia. Selain itu, Pusat Bahasa Indonesia tersebut juga diperuntukkan bagi orang Australia yang

ingin belajar Bahasa Indonesia untuk melanjutkan pendidikan di Indonesia.

Selain itu, Wieko dan Mick juga bertukar informasi mengenai tenaga profesional yang terdapat di masing-masing instansi. "Tenaga Profesional terdiri dari sipil dan militer yang sudah pensiun," kata Wieko menjelaskan mengenai Tenaga Profesional (Taprof) Lemhannas RI. Selanjutnya Wieko menjelaskan bahwa Taprof di Lemhannas RI sangat bermanfaat dalam memberikan masukan-masukan pada perkembangan teknologi yang ada.

Kemudian Mick menjawab bahwa saat ini ADC sedang mengembangkan teknologi pembelajaran siswa yakni

Scientific Fiction. *Scientific Fiction* tersebut dimaksudkan untuk melatih imajinasi dalam berbagai hal. "Setiap tahun ada teknologi baru dengan *Scientific Fiction* yang baru, kita sedang mengeksplorasi berbagai teknologi baru," kata Mick. Kemudian partisipan di ADC juga berasal dari berbagai latar belakang, sama seperti Lemhannas RI.

Dalam kunjungan tersebut, Wieko didampingi oleh Kepala Biro Kerja Sama dan Hukum Laksma TNI Budi Setiawan, S.T. dan Kepala Bagian Kolonel Edy Supriyanto, S.T. sedangkan Mick didampingi oleh Direktur Kebijakan Internasional Departemen Pertahanan Australia Sarah Russell-Farnham.

Bela Negara adalah Roh Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta



Lemhannas RI Menyelenggarakan *Intellectual Exercise* yang mengangkat tema “Menyiapkan Pembentukan Komponen Cadangan Guna Memperkuat Pertahanan Negara” pada Kamis (5/3) di Ruang Kresna, Lemhannas RI.

Hadir dalam *Intellectual Exercise* tersebut Dirjen Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan RI Prof. Dr. Ir. Bondan Tiara Sofyan, M.Si. sebagai narasumber. Bondan menyatakan bahwa UU no. 23 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (PSDN) merupakan UU yang dibuat dalam mendukung pertahanan negara.

Pada kesempatan tersebut Bondan menjelaskan bahwa ancaman yang kini dihadapi tidak hanya ancaman militer dan ancaman non-militer, namun juga ancaman hibrida. Ancaman hibrida merupakan gabungan dari ancaman militer dan ancaman non-militer yang

sifatnya mengancam pertahanan dan keamanan negara.

Bondan dalam kesempatan tersebut juga menyampaikan bahwa dalam UU no. 23 tahun 2019, sesuai dengan UU no. 3 tahun 2002 mengatur keikutsertaan warga negara dalam usaha bela negara ada 4 cara yaitu pendidikan kewarganegaraan, latihan dasar kemiliteran secara wajib bagi calon komponen cadangan yang memenuhi syarat, pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela dan wajib, serta pengabdian sesuai dengan profesi.

“Bela negara merupakan roh dari Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata), bahwa seluruh warga negara ikut serta dalam upaya pertahanan negara,” kata Bondan. Sishankamrata melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut.



Bela negara merupakan roh dari Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata), bahwa seluruh warga negara ikut serta dalam upaya pertahanan negara

Prof. Dr. Ir. Bondan Tiara Sofyan, M.Si.
Dirjen Potensi Pertahanan
Kementerian Pertahanan RI

Pancasila di Tengah Era Globalisasi



Deputi Bidang Pengkajian Strategik Prof. Dr. Ir. Reni Mayerni, M.P membuka *Focus Group Discussion* (FGD) tentang Mencari Bentuk Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Era Globalisasi bertempat pada Senin (9/3) di Ruang Gatot Kaca, Gedung Astagatra Lantai 3, Lemhannas RI.

"Ketahanan ideologi Pancasila kembali diuji ketika dunia masuk pada era globalisasi dimana banyaknya ideologi alternatif merasuki ke dalam segenap sendi-sendi bangsa melalui media informasi yang dapat dijangkau oleh seluruh anak bangsa," ujar Reni saat memberikan sambutan pembukaan FGD.

Reni menjelaskan bahwa Pancasila sejatinya merupakan ideologi terbuka, yakni ideologi yang terbuka dalam menyerap nilai-nilai baru yang dapat bermanfaat bagi keberlangsungan hidup bangsa. Namun, di sisi lain diharuskan adanya kewaspadaan nasional terhadap ideologi baru. Apabila Indonesia tidak cermat, maka masyarakat akan cenderung ikut arus ideologi luar tersebut, sedangkan ideologi asli bangsa

Indonesia sendiri yakni Pancasila malah terlupakan baik nilai-nilainya maupun implementasinya dalam kehidupan sehari-hari.

Anggota Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno Laksono, M.E., menjelaskan mengenai tantangan yang dihadapi saat ini. Tantangan pertama adalah banyaknya ideologi alternatif melalui media informasi yang mudah dijangkau oleh seluruh anak bangsa seperti radikalisme, ekstrimisme, konsumerisme. Hal tersebut juga membuat masyarakat mengalami penurunan intensitas pembelajaran Pancasila dan juga kurangnya efektivitas serta daya tarik pembelajaran Pancasila.

Menanggapi pernyataan Dave, Analis Kebijakan Direktorat Sekolah Menengah Atas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI Dr. Juandanihsyah, S.E., M.A., menjelaskan bahwa Pancasila saat ini diajarkan dan diperkuat melalui mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN) dengan penekanan pada teori dan praktik. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa pengaruh

perkembangan global juga berdampak pada anak-anak. "Pancasila saat ini dikatakan sebagai haluan kebijakan negara dan tetap kita praktikan," kata Juan.

Sementara pakar Psikologi Politik Universitas Indonesia Prof. Dr. Hamdi Moeloek melihat bahwa seharusnya representasi sosial tentang Pancasila yang diingat orang adalah Pancasila ideologi toleransi, Pancasila ideologi pluralisme, dan Pancasila ideologi multikulturalisme. Representasi sosial tentang Pancasila yang dimaksud adalah kerangka acuan nilai bernegara dan berbangsa yang menjadi identitas Bangsa Indonesia. Hamdi menjelaskan bahwa jika Pancasila menjadi acuan, maka implementasi nilai-nilai Pancasila akan lebih mudah terlihat dalam praktik bernegara. Ia juga menjelaskan bahwa Pancasila juga bisa memberikan solusi ditengah adanya beragam ideologi seperti sosialis dan liberal serta ditengah usaha politik identitas oleh agama, etnik, dan kepentingan.

Sosialisasi Pembinaan Kesadaran Hukum dan Peraturan Perundang-undangan



Lemhannas RI menyelenggarakan Sosialisasi Pembinaan Kesadaran Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan tentang “Kebijakan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Omnibus Law Dalam Sistem Hukum Nasional” pada Senin (9/3) di Auditorium Gajah Mada, Gedung Pancagatra Lantai 3, Lemhannas RI.

Sistem peraturan perundang-undangan negara saat ini memerlukan penataan ulang secara mendasar dan massif. Tumpang tindih regulasi baik dalam hubungan hirarki secara horizontal maupun vertikal disinyalir menjadi penghambat sektor tertentu yang berdampak pada pembangunan nasional.

“Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah sedang berupaya melakukan penyederhanaan dengan mengatasi konflik peraturan perundang-undangan secara cepat, praktis, dan efisien melalui Omnibus Law,” ucap

Kepala Biro Kerja Sama dan Hukum, Laksma TNI Budi Setiawan yang membacakan sambutan dari Sekretaris Utama Lemhannas RI, Komjen Pol Drs. Mochamad Iriawan, S.H., M.M., M.H.

Dr. Nasrudin, S.H., M.M. selaku Tenaga Ahli Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyampaikan, ada tiga tujuan hukum, yang pertama adalah kepastian hukum yang merupakan landasan ketentuan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintah. Kedua, Keadilan yang merupakan perlakuan yang sama sesuai dengan hak dan kewajibannya, dan yang ketiga adalah kemanfaatan yakni memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya orang.

Menyambung pernyataan Nasrudin, Bivitri Susanti yang merupakan Ahli Hukum Tata Negara menjelaskan, aspek

positif dari Omnibus Law untuk merapikan dan mengharmonisasikan pengaturan-pengaturan yang tumpang tindih, bahkan bertabrakan satu sama lain tentang satu topik yang diatur dalam Undang-undang atau peraturan yang berbeda sehingga positif bagi pemerintah dan *stakeholders* yang membutuhkan perubahan dalam waktu cepat.

Selain itu, Omnibus Law juga mempunyai aspek negatif, antara lain adalah Metode “Omnibus” tidak sederhana cenderung membingungkan dan bisa menyesatkan serta cenderung menyembunyikan hal-hal penting, karena Omnibus Law memuat banyak hal, penyusun dan pembahas cenderung luput melihat dampak atau implikasi Undang-undang dalam praktik. “Selain itu juga dianggap tidak demokratis karena besar, ia sering menyelipkan ketentuan yang sesungguhnya sulit diterima secara politik. Aspek-aspek negatif tersebut yang menyebabkan metode Omnibus Law ini ditinggalkan di beberapa negara,” sambung Bivitri.

Bivitri menyampaikan bahwa ada dua hal yang harus dijadikan kerangka besar, yang pertama dari segi kerangka konstitusional ia adalah produk legislasi yang harus berada dalam dua koridor yaitu koridor konstitusi yang harus dipenuhi, dan konstitusionalisme juga harus dipenuhi. “Karena ia (Omnibus Law) adalah undang-undang, maka tidak hanya konstitusi tapi ia juga harus tunduk betul didalam UU nomor 12 tahun 2011,” tambah Bivitri. Omnibus Law harus mengikuti UU nomor 12 tahun 2011 dan tunduk pada Asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, juga teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.

Agus Widjojo : “Pahami dan implementasikan Nilai-Nilai Kebangsaan”

Sebagai bangsa besar haruslah menjaga, memahami, dan mengimplementasikan nilai-nilai kebangsaan demi tetap tegak dan utuhnya NKRI,” kata Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo dalam upacara pembukaan Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan bagi Birokrat, Akademisi, Tokoh Masyarakat, Organisasi Profesi, TNI dan Polri pada Selasa (10/3), di Hotel The Papandayan.

Kekayaan Bangsa Indonesia yang memiliki ragam suku, budaya, bahasa, etnis, golongan dan agama merupakan kekuatan positif yang dapat mendukung pembangunan bangsa. Namun disisi lain, juga mengandung potensi konflik, yang bila tidak dikelola dengan baik dapat mengancam kelangsungan dan tetap tegak utuhnya NKRI.

Selain potensi konflik atas keberagaman, perkembangan lingkungan strategis global, regional dan nasional, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi era industri 4.0 dan era society 5.0, serta merebaknya budaya asing ke dalam kehidupan masyarakat Indonesia, menambah tantangan Indonesia. Tantangan yang muncul karena hal tersebut adalah bagaimana merangkai keberlanjutan pola pikir, pola sikap, dan pola tindak Bangsa Indonesia berdasarkan nilai-nilai kebangsaan yang bersumber dari empat konsensus dasar bangsa sebagai pijakan dalam merumuskan kebijakan nasional baik di bidang geografi, demografi, sumber kekayaan alam, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan keamanan.

Kegiatan pemantapan yang berlangsung sepekan ini merupakan salah satu jawaban Lemhannas RI terhadap permasalahan masa kini



Selain potensi konflik atas keberagaman, perkembangan lingkungan strategis global, regional dan nasional, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi era industri 4.0 dan era society 5.0, serta merebaknya budaya asing ke dalam kehidupan masyarakat Indonesia, menambah tantangan Indonesia.

Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo
Gubernur Lemhannas RI

Bangsa Indonesia, yaitu memudarnya nilai-nilai kebangsaan yang bersumber dari empat konsensus dasar bangsa yaitu Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, Sesanti Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI, terutama di kalangan generasi penerus bangsa.

Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan tersebut bertujuan untuk mentransformasikan, menumbuhkan dan melestarikan nilai-nilai kebangsaan kepada setiap komponen bangsa yang bersumber dari Pancasila, UUD NRI 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Diharapkan nilai-nilai kebangsaan tersebut dapat tercermin di dalam pemikiran, sikap dan perilaku setiap Warga Negara Indonesia, untuk memahami pentingnya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

KPK Sosialisasikan Budaya Anti Korupsi di Lemhannas RI



Tindak pidana korupsi di Indonesia saat ini tidak lagi merupakan kejahatan biasa, akan tetapi sudah merupakan kejahatan yang luar biasa karena dampaknya yang begitu luas di masyarakat," kata Kepala Biro Umum Brigjen Pol Drs. S. E. Pranggono membuka Sosialisasi Membangun Budaya Anti Korupsi dan Mekanisme Pelaporan Harta Kekayaan Sebagai Upaya Pencegahan Korupsi pada Rabu (11/3), di Auditorium Gajah Mada, Lemhannas RI.

Menjadi kejahatan luar biasa, korupsi juga menjadi masalah krusial yang dihadapi Bangsa dan Negara Indonesia yang dapat terjadi di semua lembaga dari tingkat paling rendah sampai yang paling tinggi. Dalam memberantas korupsi, setiap masyarakat Indonesia harus menanamkan nilai-nilai anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Nilai anti korupsi yang harus dimiliki adalah jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil.

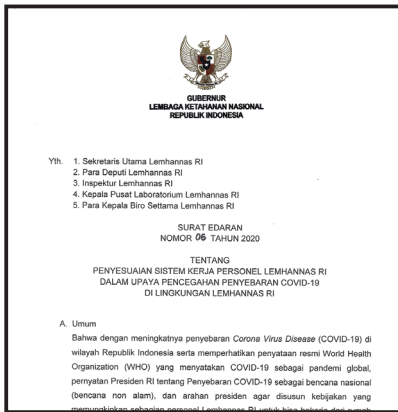
"Pencegahan tindak korupsi di Indonesia tidak akan pernah berhasil secara optimal jika hanya dilakukan oleh pemerintah tanpa melibatkan peran serta masyarakat luas," ujar Pranggono. Menurut Pranggono, seluruh lapisan masyarakat harus terlibat aktif dalam upaya pemberantasan dan pencegahan korupsi di Indonesia.

Mendukung pernyataan Pranggono, Direktur untuk Pendidikan dan Pelayanan Publik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Giri Suprapdiono yang hadir sebagai narasumber menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan jujur adalah lurus hati, berkonsep diri kuat, dan nilai utamanya adalah terus terang. Selanjutnya yang dimaksud dengan peduli adalah mencintai kebenaran dan semua diluar diri sendiri. Kemudian mandiri adalah berdikari dan fokus pada kemampuan diri kini dan masa depan. Terakhir adalah sederhana yakni kesadaran diri kuat, rapi, sopan, tidak berlebihan, bicara santun, serta menghargai proses, pencapaian, dan hasil.

Kemudian Giri juga menjelaskan mengenai strategi pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK yakni penindakan, pencegahan, serta pendidikan dan peran serta masyarakat. "Penindakan tujuannya supaya orang takut melakukan korupsi. Takut dihukum berat, dimiskinkan, dihukum sosial, dihukum politik, itu hukuman agar jera. Sedangkan pencegahan tujuannya adalah agar tidak korupsi," ujar Giri.

Lebih lanjut Giri menjelaskan bahwa upaya pencegahan adalah dengan adanya cctv yang rekamannya bisa menjadi alat bukti, sistem penggajian yang mencukupi sehingga orang takut kehilangan gaji yang selama ini diperoleh, dan sistem teknologi sehingga tidak bisa melakukan kecurangan. Kemudian yang dimaksud dengan pendidikan adalah hal-hal seperti sosialisasi yang dilakukan di Lemhannas RI. "Pendidikan tujuannya adalah agar orang tidak ingin korupsi bukan karena takut, bukan karena tidak bisa, tapi karena tidak mau," tutur Giri.

Upaya Lemhannas RI Mencegah Penyebaran COVID-19



Menyikapi perkembangan terkini mengenai meningkatnya penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) di Indonesia, Lemhannas RI membuat penyesuaian sistem kerja personel Lemhannas RI melalui Surat Edaran Gubernur Lemhannas RI Nomor 06 Tahun 2020 tanggal 17 Maret 2020 sebagai upaya pencegahan dan untuk meminimalisasi penyebaran COVID-19. Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI Agus Widjojo membuat kebijakan yang memungkinkan sebagian personel Lemhannas RI untuk bisa bekerja dari rumah (work from home). Namun 2

(dua) level pejabat struktural tertinggi di masing-masing unit kerja tetap melaksanakan tugasnya di kantor agar penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat tidak terhambat.

Dijelaskan pula, bahwa para kepala unit kerja agar mengatur sistem kerja yang akuntabel dan mengatur secara selektif pejabat/personel di unit kerjanya yang dapat berkerja di rumah melalui pembagian kehadiran dengan mempertimbangkan jenis pekerjaan yang dilakukan personel, peta sebaran COVID-19 yang dikeluarkan pemerintah pusat/pemerintah daerah, domisili personel, kondisi kesehatan personel dan keluarga personel (dalam status pemantauan/diduga/dalam pengawasan/dikonfirmasi terjangkit COVID-19), riwayat perjalanan luar negeri personel Lemhannas RI dalam 14 (empat belas) hari kalender terakhir, serta efektivitas pelaksanaan tugas dan pelayanan unit organisasi.

Terkait dengan Penyelenggaraan Kegiatan dan Perjalanan Dinas, dalam surat edaran tersebut, disebutkan bahwa seluruh penyelenggaraan tatap

muka yang menghadirkan banyak peserta baik di lingkungan Lemhannas RI maupun di daerah agar ditunda atau dibatalkan, penyelenggaraan rapat-rapat agar dilakukan sangat selektif sesuai tingkat prioritas dan urgensi yang harus diselesaikan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi atau melalui media elektronik yang tersedia.

Namun, apabila ada urgensi yang sangat tinggi dan harus diselenggarakan rapat dan/atau kegiatan lainnya di kantor, agar memperhatikan jarak aman antar peserta rapat (*social distancing*). Selain itu, Perjalanan dinas dalam negeri agar dilakukan secara selektif dan sesuai tingkat prioritas dan urgensi yang harus dilaksanakan dan menunda perjalanan dinas ke luar negeri.

Pelaksanaan tugas kedinasan di tempat tinggal sebagaimana dimaksud, berlaku sejak 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020 dan akan dievaluasi lebih lanjut, sesuai dengan perkembangan keadaan. Setelah berakhirnya masa berlaku sistem kerja ini kepala unit kerja akan melakukan evaluasi atas efektivitas pelaksanaannya dan dilaporkan kepada Gubernur Lemhannas RI

Minimalisir Penyebaran COVID-19, Kantor Lemhannas RI Disemprot Disinfektan

Setelah membuat penyesuaian sistem kerja personel serta melaksanakan pemeriksaan suhu tubuh dan tenggorokan pada pegawai Lemhannas RI, kini dilakukan penyemprotan disinfektan pada fasilitas kantor Lemhannas RI sebagai upaya minimalisir penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19).

Bekerja sama dengan pihak Palang Merah Indonesia (PMI), penyemprotan disinfektan tersebut dilaksanakan pada Jumat (20/3). Pihak PMI menyampaikan bahwa cairan disinfektan yang disemprotkan merupakan campuran

dari cairan *virkon* dan air bersih dengan perbandingan 1:10.

Penyemprotan disinfektan sangat ditekankan pada tempat-tempat umum seperti lobi tiap gedung, Masjid, ruang kelas, ruang makan peserta dan ruang rapat. Diharapkan penyemprotan disinfektan tersebut dapat meminimalisir penyebaran COVID-19 serta menjaga kesehatan seluruh personel Lemhannas RI.

Pelaksanaan kegiatan tersebut sempat disaksikan langsung oleh Wakil

Gubernur Lemhannas RI Marsdya TNI Wlieko Syofyan dan Sekretaris Utama Lemhannas RI Komjen Pol Dr. Mochamad Iriawan, S.H., M.M., M.H serta Kepala Biro Umum Brigjen Pol Drs. S. E. Pranggono.



Innalilahi Wa Inna Ilaihi Rojiun
Turut berduka cita atas berpulanginya



Ibu Hj. Sujiatmi Notomiharjo

Ibunda dari Presiden Joko Widodo

Semoga amal ibadah dan kebajikannya diterima
di sisi Allah SWT, dan keluarga yang ditinggalkan
diberikan kesabaran dan ketabahan.

Tim Redaksi newsletter Lemhannas RI

Penanggung Jawab: **Sugeng Santoso** Redaktur: **Adri Koesdyanto**

Penyunting/Editor: **Bambang Iman Aryanto** Pembuat Artikel: **Naomi Augustina**

Penerjemah: **Magista Dian Fitrilia** Desain Grafis: **Arini Maulidia** Fotografer: **Suryadi**

Sekretariat: **Irina Sri Ekowati, C. Hildamona Permatasari, Mardiana Prihatini,
Gatot, Yatik Wulandari, Yusradi**

Alamat Redaksi:

Biro Humas Settama Lemhannas RI, Jl. Medan Merdeka Selatan No. 10, Jakarta Pusat, 10110

Telp. (021) 3832108, 3832109 Fax. (021) 3451926

Website <https://www.lemhannas.go.id>